**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Hubungan Internasional pada dasarnya mencakup seluruh aspek kehidupan sosial manusia yang bersifat Internasional. untuk memenuhi kebutuhan hidup negaranya, setiap negara-negara di Dunia akan melakukan interaksi dengan negara lain. Sejarah terjadinya Hubungan Internasional ini dikarenakan adanya keinginan bangsa-bangsa di dunia untuk mencapi suatu perdamaian dunia. Setelah era perang dingin (the cold war) usai, terjadilah pergeseran paradigma untuk memehami ancaman dan praktik keamanan antara lain kejahatan lintas negara tidak saja pada aspek militernya, tetapi sudah lebih terfokus pada aspek non-militernya yang lebih rumit subtansi permasalahannya. untuk menghinadri berbagai masalah konflik dan keamanan baru yang berupa aksi-aksi melintasi batas seperti kejahatan transnasional (transnasiona crime) ini telah menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia mengingat dampaknya yang bisa merusak banyak bidang kehidupan manusia.[[1]](#footnote-1)

Kejahatan Lintas Negara pada dasarnya adalah kejahatan yang berdampak terhadap dua negara atau lebih. Jenis dan ruang lingkup kejahatan lintas negara ini telah berkembang sedemikian rupa, dianataranya termasuk adalah terorisme,penyelundupan senjata (*arm smuggling*), pencucian uang(*money laundering*), sea pirace, cyber crime dan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Perdaganagan Manusia juga di sebut sebagai *“Trafficking*” atau “*HumanTrafficking* istilah ini di ambil dalam bahasa Inggris berarti perpindahan. Jadi, artinyaperpindahan atau migrasi yang berarti korban di bawa keluar dari kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya dan di kerjapaksakan. Inilah yang membedakan *Trafficking* dari bentuk pelanggaran hak asasi lainnya. Secara sederhana, *Trafficking* adalah segala bentuk perbudakan modern.

Prostitusi anak bermula adanya perdagangan anak *(child trafficking*) yang berkembang hampir di seluruh bumi ini. Selain itu adanya perkembangan dan dan kegiatan pariwisata. Kawasan Asia dikenal sebagi kawasan lintas batas perdagangan anak untuk tujuan prostitusi dan keadaanya sangata memprihatinkan yang di mana prostitusi tersebut melanda anak-anak usia muda yaitu kurang dari 18 tahun. Hukum mengenai hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataan, tatanan dunia dan prilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan melanda satu negara melaiakan hampir seluruh negara di dunia ini. *Trafficking* tidak hanya merampas hak asasi tapi mereka juga rentan terhadap kekerasan, penyakit, trauma dan bahkan kematian.

Dalam menghadapi kejahatan transnasional di mana masalah *trafficking* merupakan ancaman keamanan multinasional dan yang merugikan kaum perempuan dan anak-anak Karena dianggap sebagi objek yang lemah untuk di ekpolitasi oleh kraena itu pelaku *Trafficker* menipu, mengancam, dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban kedalam pekerjaan mirip perbudakan atau kedalam prostitusi. Korban menghadapi penyiksaan, kekejaman, kerja paksa, pemerasan. Banyak hanya menerima sedikit gaji atau tidak sama sekali sebagai bayaran pekerjaan mereka terus dipaksa bekerja untuk jam kerja berlebihan bahkan seringkali tanpa istirahat. Msing-masing memiliki pengalaman yang berbeda dan dari beberapa mereka mungkin tidak akan pernah pulih betul dari siksaan yang telah mereka derita.

Beberapa pelaku *trafficking* adalah bagian dari sindikat internasional. namun lebih banyak dari mereka bukan bagian dari kejahatan teroganisir. Di anatara mereka adalah agen prekrut tenaga kerja, pemuka masyarakat, aparat pemerintah dan bahkan teman serta kerabat. Meskipun mampu memberi hukuman berat pada pelaku *Trafficking*, penegak hukum selalu meloloskan mereka karena kurangnya kesadaranatau bahkan berkolusi dengan tersangka.[[2]](#footnote-2) Dan para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang mengerikan luka fisik dan psikologi, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat seringsekali meninggalkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Para korban perdagangan manusia sering sekali kehilngan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Dalam kasus ekspolitasi pada korban perdagangan manusia terus meningkat: seorang anak yang diperjualbelikan dari satu kerja paksa dapat terus di permalukan dengan kejam di tempat lain.[[3]](#footnote-3)

Perdagangan manusia adalah pelanggaran HAM (hak asasi manusia), pada dasarnya perdagangan manusia melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup merdeka dan bebas dari bentuk perbudakan. Perdagangan anak-anak merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan meruksak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan ekspolitasi seksual.

Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ( PBB 1948) mendefinisikan HAM secara luas dengan tujuan agar manusia di seluruh dunia saling menghormati hak asasi semua orang. Dalam deklarasi tersebut tidak banyak membicarakan perempuan tetapi dalam artikel tersebut di muat bahwa “ *everyone is entitked to all the right andfreedom set forth in this declaration, without distinction of nationalor social origin property, brith, region, political or other status” [[4]](#footnote-4)*

Berdasarkan artikel tersebut dapat di simpulakan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam berbagai bentuk, seperti tindakan kekerasan mereupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)[[5]](#footnote-5).Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam, seperti ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (*inequality*), perendahan (*subordination*) status perempuan*(trafficking in women*), kurangnya posisi tawar menawar, kurangnya aksespengambilan keputusan politik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang belum peka gender, keterbatsan kesempatan mengaktualisasikan diri, tindakan kekerasan (*violence against women*) dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan lainnya.[[6]](#footnote-6)

Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekkuensi bagi munculnya permasalaha-permaslahan sosial termsuk pada perempuan dan anak salah satunya adalah berkembangnya perdagangan perempuan dan anak (*trafficking women and children*). Meningkatnya arus globalisasi dan teknologi menyebabkan manusia secara mudah melakukan perpindahan lintas batas negara. Keadaan ini mengingatkan adanya resiko kegiatan *trafficking* di dalam suatu negara. Apalagi didukung oleh keinginan manusia itu sendiri untuk melakukan perpindahan apakah itu untuk melakukan sebuah perjalanan (*travel*) atau untuk mencari pekerjaanyang layak. Pada awalnya *trafficking* hanya mencangkup ekpolitasi seksual saja, tetapi seiring denganperubahan zaman konsep *trafficking* semakin berkembang. Kegiatan *trafficking* tidak hanya terjadi di dalam suatu negara tetapi dapat dilakuakan lintas batas negara (*transnasional*), sehingga tidak ada negara yang terhindar dari kegiatan tersebut termasuk Indonesia

Tidak dapat di ketahui secara pasti kapan kegiatan *trafficking* terhadap anak dan perempuaan muncul di Indonesia, karena pada awalnya kegiatan*trafficking* ini telah terabaikan oleh pemerintah selama berpuluh-puluh tahun.Walaupun pemerintah telah berusaha meratifikasi instrument internasional mengenai perbudakan dan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia.

Lemahnya sektor ekonomi sangat merugikan bagi perekonomian suatu negara, dimana perlu menciptakan lebih dari 2 juta pekerjaan setiap tahunnya agar dapat menyerap pencari kerja baru. Orang-orang yang bekerja pada sektor informal merasa bahwa pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga salah satu profesi yang sejak lama menjadi pelarian utama orang-orang dan pengangguran di desa adalah menjadi buruh migran. Namun menjadi buruh migran bukan pula pilihan yang aman ketika perekonomian dalam keadaan memburuk. Lemahnya perekonomian tersebut merupakan kondisi ideal bagi perdagangan dan ekspolitasi serta kekerasan terhadap buruh, calon buruh perempuan dan anak-anak, karena banyak orang telah terperangkap di jurang kemiskinan di desa maupaun di kota.

Perdagangan perempuan dan anak-anak saat ini sering terjadi di Indonesia. Dimana perempuan dan anak-anak tersebut di manfaatkan untuk prostitusi, pornografi,peminta-minta, pembantu rumah tangga, pengedarnarkoba serta berbagia macam pekerjaan eksploitatif. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang paling mendasar, bersifat multidimensi, baik dilakukan secara terang-terangan maupun terse lubung.[[7]](#footnote-7)

Perdagangan manusia atau dikenal dengan istilah *human trafficking* adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan mengingat jumlah korbannya yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia adalah bisnis yang menguntungkan dan sering dianggap sebagai tindak kriminal paling menguntungkan ketiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata. Menurut International Labor Organization (ILO), keuntungan yang dhasilkan dari perdagangan manusia bisa mencapai US$ 31 milyar per tahun.

Banyaknya kasus *trafficking* dipengaruhi beberapa faktor yang melatar belakangi, faktor utama adalah kemisikinan, pada tahun 2009 Indonesia berpenduduk 231 juta orang sekitar 32,7 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 830 keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari 20,000 per hari. Para keluarga miskin berupaya menambah penghasilan penghasialan mereka selain mengikutkan istri ke dalam pekerjaan, anak pun di manfaatkan meskipun mereka belum cukup umur.[[8]](#footnote-8)

Apalagi mereka diimingi-imingi gaji yang lumyan tinggi karena terbelit dengan keluarga yang miskin, maka mereka pun bersedia dengan harapan dapat menghidupi keluarganya. `Adapun kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang menimbulkan depresi dan frustasi. Kondisi ini menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Maka anak jadi tidak kerasan tingal di rumah,sehingga hal ini dapat menyebkan anak mencari perlindungan dari orang lain, yang pada gilirannya dapat membawa masuk ke dalam sindikat perdagangan anak dan perempuan.[[9]](#footnote-9) Faktor-faktor liannya yang melatarbelakangi *trafficking* anatara lain:

* Pendidikan sekitar 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh anak remaja putus sekolah
* Perkawinan usia muda 30% perempuaan menikah sebelum usia 16 tahun menurut data SUPAS tahun 1995, perkawainan usia dini berresiko terjadinya perceraian pada usia perkawinan 10-14 tahun 3 lebih banyak.
* Kondisi sosial keluarga dan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih patriarkhis, di mana posisi masih belum setara dengan laki-laki baik di dalam suatu keluarga maupun diberbagai kehidupan.[[10]](#footnote-10)

Selain itu pemahaman anak juga masih rendah, di mana anak oleh sebagian keluarga masih di anggap milik orang tua, dan orang tua memandang anak perempuan sebagai asset yang akan mendatangkan keuntungan yang besar. Kadangkala ada orang tua yang tega sampai menjual anak perempuannya karena tertarik dengan harga yang tinggi (*harga keperawannya*).[[11]](#footnote-11)

Tingginya faktor *supply* tidak terlepas dari meningkatnya demand masyarakat yang terus meningkat.[[12]](#footnote-12)*Demand* masyarakat tidak terlepas dari daya beli masyarakat dengan adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak akan menjadi orang awet muda dan dapat dijadikan obat kuat yang akan mendatangkan hoki tertentu. Anak-anak yang di pandang masih bersih dari penyakit kelamin dan belum tentu banyak yang memakainya, sehingga lebih menambah selera konsumen, faktor itu di dukung karena adanya *faedofil* yang menyukai hubungan seks dengan anak-anak[[13]](#footnote-13).

Adapun lemahnya kontrol negara dalam penegakkan hukum mengakibatkan meningkatnya kegiatan *trafficking* tersebut, khususnya di wilayah pengiriman tenaga kerja secara illegal tanapa adanya dokumen yang sah seperti paspor. Adanya oknum aparat yang bersedia memberiakan kemudahan pengurusan paspor dan paspor lintas negara melalui praktek percaloan, sehingga sehingga penguasaan dan validitas data pemegang paspor tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) untuk mengirimkan korban perdagangan manusia dibawah umur ke luar negri.[[14]](#footnote-14)

Perdagangan perempuan dan anak baik sebagai pekerja seks komersial maupun pekerja ilegal, merupakan masalah rumit yang tidak bisa di batasi oleh suatu instansi saja karena Indonesia tidak hanya jadi pemasok dan penyalur, tetapi juga sebagai tempat transit perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Indonesia dalam manghadapi *trafficking* ini sudah melakukan ratifikasi terhadap instrumen internasional yang berkaiatan dengan penghapusan perdagangan manusia antara lain undang-undang no. 68 tahun 1958 yaitu konvensi tentang hak politik perempuan *(the convention on political right for women*), undang-undang no. 7 tahun 1984 yaitu konvensi tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *(The UN Convention on Elimination Dicrimination AgaintsWomen, CEDAW*),undang-undangno. 5 tahun 1998 yaitu konvensi melawan penyiksaan dan kekejaman lain, perlakuan atau hukuman yang merendahkan atau tidak manusiawi (*The UN Convention Againts Torture and Other ovel, in Human and DegradingTreatment of punishment*) serta konfrensi ILO no. 29 tahun 1930 tentang kerjapaksa (The Forces Labour Convention of ILO no. 29, 1930) yang telah diratifikasi tahun 1950, sedangkan undang-undang nasional yang memadai guna menghapus perdagangan manusia antara lain undang-undang no. 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak. Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam rangka kerjasama regional, Indonesia telah memperkuat kerjasama antara anggota ASEAN, yang terus meningkatkan kegiatannya dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral, sejahtera dan bebas dari ancaman Transnational Organized Crime (TOC). Dalam lima tahun terakhir ini, ketahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik telah menunjukkan kemajuan yang berarti. "ASEAN Regional Forum (ARF) " telah memperlihatkan fungsinya yang semakin penting sebagai wahana kerjasama di bidang politik dan mengelola masalah keamanan (*security management*) agar stabilaitas terjaga antara ASEAN dengan para negara-negara anggotanya.[[15]](#footnote-15) Indonesia yang mengusulkan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASC-ASEAN Security Community) dalam kerangka ASEAN Concord ke-2 pada KTT ASEAN ke-9 yang berlangsung Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober 2003.

Yang berperan memerangi kejahatan lintas negara (transnational crime) Konsep ini akan efektif jika masing-masing negara anggota mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan kesepakatan. Di masa depan, karena arti *security* dalam konsep ini tidak lagi didefinisikan dengan serangan militer, tapi juga harus menghadapi non-militer terorisme, hubungan antara dua negara (bilateral) perdagangan manusia (*traficking*) dan pencucian uang (*money laundrying*). penyelundupan senjata (*arm smuggling*) dan sea pirace, cyber crime. Dan pembentukan komunitas keamanan ASEAN (asean security community) Menurut Wisber, tantangan yang mesti dihadapi dalam pembentukan komunitas ini antara lain adanya jurang perbedaan tingkat perkembangan ekonomi serta sistem politik dan sosial yang terdapat di antara negara-negara ASEAN, yang lahir 8 Agustus 1967 di Bangkok, saat ini beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Dan berharap keadaan ini dapat ditanggulangi agar jurang pemisah jangan semakin membesar. Sebab, stabilitas kawasan ASEAN sangat tergantung pada kerja sama antara negara dan keberhasilan menanggulanginya.[[16]](#footnote-16)

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut menjadi permasalahan keamanan kawasan menjadi kompleks. Kompleksitas kawasan juga muncul akibat perbedaan perekonomian yang cukup tinggi dikawasan Asia, dimana terdapat beberapa negara yang menjadi pusat ekonomi dunia, juga terdapat beberapa negara yang masuk kedalam kelompok negara-negara berkembang dan miskin dunia. Dan kesenjangan antara negara-negara inilah yang dianggap sebagai pendorong meningkatnyan migrasi dalam kawasan terutama di Asia Tenggara.

Kesenjangan perekonomian antara lain yang ditengarai menyebabkan meningkatnya *unregulated migration[[17]](#footnote-17)*ini. yang menjadi permasalahan beberapa negara dikawasan Asia Tenggara. Indonesia, Vietnam dan Pilipina merupakan beberapa negara yang memiliki tingkat *unregulated migration* yang cukup tinggi baik yang bergerak didalam kawasan Asia Tenggara maupun kebeberapa kawasan lainnya. Berdasarkan Laporan ILO, antara tahun 2006 sampai 2009 total tenaga kerja tidak bekerja *(unemployment)* dinegara-negara ASEAN meningkat dari 5 persen menjadi 6.6 persen dimana angka ini disumbang terbesar oleh Indonesia (sebagai pasar tenaga kerja terbesar dikawasan Asia Tenggara) yang mengalami peningkatan pengangguran dari 6.1 persen menjadi 10.4, sementara dibeberapa negara ASEAN lainnya relatif menurun atau tetap.[[18]](#footnote-18) Permasalahan ini mendorong bertambahnya tenaga kerja migran dari Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Beberapa dari mereka merupakan „korban‟ dari *human trafficking* dan *human smuggling.*

Tenaga kerja wanita (TKW) ke mancanegara. Dari beberapa hasil studi menunjukkan 10 persen dari jumlah TKW itu, yakni sekitar 290.000 bermasalah, termasuk kasus *trafficking*. Bahkan dari jumlah yang bermasalah itu, baru 10 persen yang ditangani. Khusus untuk kasus *trafficking* yang melibatkan korban warga negara RI di Malaysia, sepanjang 2006 mencapai jumlah 2.846. Sedangkan jumlah akumulasi selama 4 tahun dari 2006-2009 mencapai 8.886 kasus.[[19]](#footnote-19) Dari beberapa kasus *human trafficking* ini cukup banyak tenaga kerja asal Jawa Barat yang terlibat menjadi korban yang di dominasi oleh tenaga kerja asal Jawa Barat Kab. Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur.

Hal ini berupaya untuk mengaplikasikan *securitization theory* pada kasus *human trafficking* yang banyak terjadi di Indonesia khususnya bagi daerahpemasok, dengan mememetakan beberapa permasalahan berikut: apakah yang menjadi pendorong terjadinya kasus *human trafficking* di Indonesia, apakah kedekatan kultural antara negara-negara ASEAN turut berkontribusi dalam *humantrafficking.* Dan mengingat tingginya *human trafficking* terjadi antara negaraASEAN (Indonesia-Malaysia-Singapura) bagaimanakah tindakan masing-masing negara ASEAN memandang permasalahan lintas batas manusia *(human flows)* ini sebagai permasalahan keamanan

Selama ini permasalahan *human trafficking* kurang mendapat perhatian pemerintah karena dianggap bukan permasalahan yang penting. Dengan menitikberatkan keamanan (*human security)* maka diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih mengingat permasalahan *human trafficking* bukan permasalahan sosial biasa melainkan permasalahan keamanan suatu negara. Dengan demikian diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi pada pola *unregulated migration* di kawasan Asia Tenggara, dan memberikan pemahamanpenggunaan kerangka kerja *security* serta memberikan masukan pada pemerintah pusat dan daerah tentang permasalahan *human trafficking* dari kerangka berpikir keamanan non-tradisional.

Salah satu isu yang dianggap sebagai permasalahan keamanan non-tradisional yang banyak terjadi di Asia Tenggara adalah permasalah migrasi ilegal[[20]](#footnote-20) yang termasuk didalamnya adalah permasalahan *human trafficking* penyelundupan dan perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulut di deteksi dan ringan sangsi hukumnya di banding, misalnya kejahatan perdagangan gelap, obat-obatan dan terorisme.

Bagi sebagian besar negara anggota ASEAN persoalan ini diperburuk oleh lemahnya kemauan Politik dan kemampuan lembaga yang menangani persoalan transnasional tersebut, jenis kejahatan ini melibatkan perdagangna buruh ilegal dari Indonesia dan Filipina ke Malayasia, Singapura dan kawasan Asia tenggara menuju Australia. Disamping itu perdagangan wanita dan anak-anak pun berkembang pesat untuk memenuhi permintaan pasar prostitusi di kawasan Asia tenggara beberapa negara ASEAN merupakan negara sumber, seperti Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand dan Indonesia merupakan negara *supply*. Sementara Malaysia dan Singapura justru merupakan negara *demand*. adalah salah satu negara tujuan bagi para *trafficker*.

Dari permasalahan yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul : **“PENGARUH ANCAMAN HUMAN TRAFFICIKING DI INDONESIA TERHADAP ASEAN SECURITY COMMUNITY”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulismengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ancaman Human Trafficking di Indonesia?
2. Bagaimana peran ASEAN dalam menanggulangi ancaman Human Trafficking di Indonesia?
3. Bagaimana ancaman Human Trafiicking di Indonesia berdampak terhadap ASEAN Security Community?
4. **Pembatasan masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas dari Dampak Human Trafficking di Indonesia terhadap ketahanan dan keamanan ASEAN serta apa yang di batasi pada upaya-upaya yang di lakukan pemerintah Indonesia- ASEAN dalam menanggulangi Human trafficking

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini diajukan untuk memudahkan menganalisa yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti sebagai berikut : **“Sejauhmana Human Trafficking di Indonesia berperngaruh terhadap ASEAN Human Security”**

1. **Tujuan dan kegunaan penelitian**

**1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian berkaiatan dengan penelaahan, pemahaman dan pengembnagan objek yang di teliti. Dengan demikian tujuan penelitian merupakan aplikasi dengan pengesahan dilaksanakannya suatau penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana ancama Human Trafficking di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauhmana peran ASEAN dalam mengatasi Human Trafficking di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ancaman Human Trafficking di Indonesia terhadap ASEAN Human Security.
4. **Kegunaan penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti mengenai pristiwa,masalah dan fenomena yang terjadi di kawasan asia tenggara khususnya ancaman *human trafficking* di Indonesia
2. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang sifatnya ilmiah, sekaligusmengimplementasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Pasundan.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujiansidang pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis** 
   1. **Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah penelitian dan mencari landasan dalam penelitian maka penulis menggunakan menggunakan konsep-konsep maupun teori yang menunjang dalam penelitian. Sebagai pedoman untuk mempermudah penulisan dalam melakukan melakukan penelitian, penulis mengemukakan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli hubungan internasional.

Hubungan Internasional merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri menrurut Suwardi Wiriaatmadja dalam bukunya *pengantar IlmuHubungan Internasional*. hal yang hampir sama dikemukakan oleh Trigive Mathisenmengemukakan istilah Hubungan Internasional dalam berbagai arti, yaitu:

1. **Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.**
2. **Sejarah baru dari Politik Internasional**
3. **Semua aspek Internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi berasal dari suatu Negara yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di Negara lain.**

Hubungan Internasional semakin berkembang menjadi disiplin ilmu yang semakinhari semakin luas . menurut **Suwardi Wiraatmadja** dalam pengatar hubungan internasional mengatakan bahwa**”Hubungan Internasional lebih sesuai macamhubungan antar bangsa dan masyarakat dunia dan kekuatan cara mentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia”[[21]](#footnote-21)**

Pengertian Hubungan Internasional di atas menerangkan secara umum tentang ruang lingkupnya yang luas, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa studi Hubungan Internasional menyangkut seluruh aspek sosial masyarakat internasional. maka tidak mengherankan kalau ada yang berpendapat bahwa hubungan internasional dapat di identifikasi dengan totalitas interaksi kepentingan masing-masing negara yang masing-masing di salurkan dalam politik luar negrai masing-masing negara tersebut.

Dalam masyarakat internasional yang memiliki pandangan yang berbeda–beda, seperti dalam masalah perbedaan sistem Negara, ekonomi, ideologi, industry dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbedaan kepentingan. kesemuanya itu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuraan negaranya. Dalam memahami dinamika interaksi antar anggota masyarakat internasional maka tidak akan lepas dari studi mengenai Hubungan Internasional dimana pola-pola interaksi dilakukan lebih dari satu negara dan merupakan unit pelaku dalam analisis sistem internasional yang disebabkan adanya interaksi dan interdepedensi antar negara, K.J. Holsti menjelaskan bahwa hubungan internasional menurutnya adalah[[22]](#footnote-22):

***All kind of interaction among society both for conducted by citizen or government. And cover all relations among various state in the world cover international trade institute and growth of international ethics and value.***

**Segala bentuk interaksi dianatara masyarakat negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi segala hubungan dianatara berbagai negara di dunia meliputi lembaga perdagangan internasional dan perkembangan nilai dan etika internasional**

Dalam berinteraksi suatau negara dengan negara lainnya menimbulkan suatu hubungan yang tidak dapat dilihat sebagai kecenderungan -kecenderungan paham atau ideologi yang dianut negara tersebut. Hal ini membuat timbulnya satu sistem yang berlaku dalam dunia internasional. sistem internasional yang dapat bipolar maupun multipolar mempengaruhi kecenderungan keberadaan kondisi internasional. definisi sistem internasional yang di kemukakan oleh **K.J Holsti** adalah sebagai berikut : **“sistem internasional adalah pola interaksi diantaranegara-negara di dunia dibentuk oleh struktur negara-negara kuat”**

Pada dasarnya tujuan dari hubungan internasional adalah mempelajari prilaku internasioanal, yaitu perilaku peran aktor negara (*state actors*) maupun non-negara (*Non-state actors*) di dalam era transaksi internasional. Menurut **Teuku May Rudy:**

**Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama ( *cooperation*) persaingan (*competition*), dan pertentangan(*conflict*). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisipersaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerja sama .[[23]](#footnote-23)**

Adapun pengertian kerjasama internasional menurut **Teuku May Rudy** adalah sebagai berikut:

**Kerjasama internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas Negara baik antar pemerintah ataupun non pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Jika kerjasama internasional itu dalam bentuk organisasi internasional maka harus ada struktur organisasi yang jelas dan lengkapyangmelaksanakanfungsiorganisasi secara berkesinambungan. [[24]](#footnote-24)**

Apabila kerjasama internasional itu di bentuk suatu interaksi politik, maka negara Indonesia telah bertindak sebagai *Internasional Politic*. Adapun pengertian politik internasional menurut Ahmad Dahlan Nasution, sebagai berikut:“**Politik Internasional adalah usaha memperjuangkan perbedaan-perbedaan atausengketa nilai dandan tidak timbul dari lingkungan objektif, melainkan dari keyakinan atau pendapat yang di buat manusia atas kondisi tadi” [[25]](#footnote-25)**

Sementara itu, Hans Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* memberikan pendapat sebagai berikut: **“Bahwa politik internasional selalu berarti politik kekuasaan yaitu ditandai dengan kenyataan bahwa masing-masing negara selalu berjuang untuk memperoleh dan menambah kekuasaan”[[26]](#footnote-26)**

Selain kerjasama internasioanl terdapat suatu kerjasama yang lebih spesifik

berdasarkan batas wilayah. Definisi kerjasama regional menurut **B.N Marbun** adalah sebagai berikut: **“persekutuaan atau kerjasama diantara negara-negara yangmemiliki kesamaan kepentingan politik, dan militer diantara negara-negara dalam suat kawasan yang bertujuan untuk memelihara perimbangankekuatan.”[[27]](#footnote-27)**

Wadah atau sarana untuk mengadakan kerjasama internasional itu menurut **Jack C Plano** dan **Roy Olton** yang diterjemahkan **oleh Wawan Juanda**, salah satunya adalah melalui Organisasi Internasional. **“Organisasi Internasional adalah suatu ikatan formal yang melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan,ekonomi,sosial,serta bidang lainnya”[[28]](#footnote-28)**

Hal tersebut diperjelas oleh **Teuku May Rudy** yakni:

**Organisasi Internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.**

A**s**ia Tenggara merupakan salah satu sub kawasan di dunia yang melakukan interaksi tidak hanya sesama Asia tenggara tetapi juga berinteraksi dengan negara lain di luar kawasan. Asia Tenggara mengadakan kerjasama regional dengan membentuk ASEAN. **Jack C. Plano** dan **Roy Olton** mengatakan bahwa**:”ASEAN****mencerminkan upaya untuk mengembamngkan pemecahaan permasalahanbangsa Asia, khususnya Asia Tenggara melalui kerjasama seluruh bangsa dikawasan.”**

Dilihat dari maksud dan tujuannya menurut **Teuku My Rudy** maka:**“ASEAN termasuk Cooperation Organization, dimana setiap anggota dianggap sederajat dan mempunyai kedaulatan masing-masing. Kegiatannya difokuskan kepada kerjasama disemua bidang antar negara anggota pada khususnya dan demi perdamaian umat manusia.” [[29]](#footnote-29)**

Didirikan tahun 1967 dasarnya merupakan suatu wadah kerjasama di bidang ekonomi dan sosial budaya, ASEAN mencerminkan upaya untuk menagmbangkan permasalahan bangsa Asia melalui kerjasama seluruh bangsa di kawasan tersebut, seperti yang tertulis dalam Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1987 yaitu:

***“The association represents the collective will of the nations of to bindthemselves together in friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their people and for posterity the blessings of peace, freedom, and prosperity.”***

Pembentukan organisasi regional dimungkinkan baik oleh adanya keinginan negara-negara anggota menyelesaikan masalah *transnasional* untuk menciptakan perdamaian diperlukan sarana diplomasi sebagai salah satu teori dala m hubungan internasional dalam penyelesaian masalah sehingga dapat tercipta kesepahaman. Seperti yang dikemukakan oleh Hans J. Morgentau:**“Diplomasi adalah bentuk-bentuk dan cara-cara untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan dalam hubungan internasional dengan menggunakan kecerdasan dan kelincahan berkenaan dengan pelaksanaan hubungan resmi pemerintah dari negara-negara berdaulat.” [[30]](#footnote-30)**

Negara-negara ASEAN menyadari bahwa pencantuman kerjasama politik pada tahap awal merupakan hal yang sensitif bagi kelangsungan organisasi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa sikap ragu-ragu ASEAN untuk merumuskan peran keamanan di kawasan asia tenggara secara terbuka adalah merupakan penceriman dari adanya dilema antara sensitivitas historis yang melandasi pembentukan ASEAN dan realita kontemporer di kawasan.

*Pertama,* membuat ASEAN secara formal tetap berpegang pada karakterkerjasama ASEAN yang non-politis yang *kedua*, melahirkan peran keamanan regional ASEAN yang terkesan ragu-ragu. Akibatnya tidak heran apabila ASEAN tidak selalu berhasil dalam merealisasikan agendanya di pentas regional.**“Pembahasan isu keamanan regional, terutama di negara-negara dunia ketiga. Sering didasrakan atas pola permusuhan, ketakutan, rivalitas, dari pada pola-pola persahabatan, kepercayaan dan kerjasama.”[[31]](#footnote-31)**

Namun dewasa ini pendekatan tentang masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional terutama dimensi non militer seperti degradasi lingkungan, masalah kemiskinanan, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan perempuan dan anak, pekerja illegal, terorisme dan penyebaran penyakit menular. Perluasan pemikiran ini muncul sejalan dengan perubahan kondisi keamanan.

Suatu tindakan yang diambil oleh suatu negara dan adanya respon dari negara lainnya, maka didalamnya terkadang terdapat suatu refreksi kondisi domestik yang ingin dipertahankan dan diperjuangkan oleh suatu negara, hal ini biasa sering diklasifikasikan sebagai apa yang kita sebut dengan kepentingan nasional. Munculnya organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia merupakan salah satu alat untuk mengorganisir masyarakat internasional secara politik sebagai reaksi terhadap anarki yang disebabkan sengketa-sengketa bersenjata yang semakin banyak, baik antar negara maupun antar kelompok-kelompok yang ada dalam suatu negara.

Didi kresna mengemukakan pengertian keamanan sebagai berikut:

**Keamanan adalah merupakan kewajiban suatu negara untuk menjamin terciptanya suatu kondisi yang aman serta mengatur ketertiban sehingga masyarakatnya dapat menjalankan aktivitasnya dengan tentram dan melindungi negara tersebut. Dalam Hubungan Internasional kesemua itu ditujukan untuk mencapai kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyatnya sebagai fundamental.[[32]](#footnote-32)**

Dalam hal ini konsep negara adalah sebagai salah satu aktor harus di pahami secara sederhana, negara adalah sebuah pemerintahan yang dimiliki kedaulatan dan diakui keberaberadaannya oleh negara yang memiliki kedaulatan lainnya. Dalam berinteraksi dengan negara lain, negara memiliki tujuan-tujuan nasional yang hendak di capai. Secara umum tujuan nasional suatu Negara adalah :

1. Pertahanan Diri
2. Keamanan Nasional
3. Kesejahteraan
4. Prestise Nasional
5. Ideology atau Style of life

Sama dengan negara-negara lainnya di Asia tenggara, Indonesia disni berupaya untuk menciptakan dan merpertahankan lingkungan regionalnya dengan posisi yang menguntungkan di mata waraga negaranya sendiri atau di mata dunia internasional. Semua yang dilakukannya dalam rangka memberikan dirinya sendiri kesempatan dan dukungan semaksimal mungkin agar tujuan nasionalnya dapat tercapai.

Human Traffcking adalah *pelanggaran Hak Asasi Manusia* pada dasarnya bukan masalah yang baru yang di hadapi oleh negara. Terdapat dua tipe masalah menurut William D.Coplin dan Marsedes Marbun:

**1.** **Tipe 1, menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apatik tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat.**

**2.** **Tipe 2, menyangkut keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestic tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama.**

Untuk mengatasi masalah *Human Trafficking* yang menyangkut masalah nasional, regional dan internasional, Indonesia sebagai sebuah negara melakukan beberapa upaya. Upaya yang dilakuakan oleh Indonesia terdiri dari kegiatan seperti penyuluhan, kampanye, pelatihan, serta bimbingan. Masalah *Human Trafficking* merupakan bagian dari pelanggaran nilai-nilai kemanusianyang berbeda dalam tingkat yang cukup karena perbudakan masa kini. Perbudakan atau slavery sendiri mengandung arti dasar suatu bentuk formasi sosial dari politik ekonomi berdasarkan suatu pelayanan jasa di luar kemauan seseorang. Perbudakan sudah berlangsung sangat lama. Perbudakan dahulu tersebut memiliki karakteristik yang cukup jauh berbeda dengan perbudakan jaman sekarang. **Menurut Paul R. Viotti dan Mark V.Kauppi** fungsi perbudakan adalah:

* **Kepemilikan yang sah sangat ditegaskan**
* **Biaya tinggi dalam kepemilikan**
* **Keuntungan dalam perdagangan rendah**
* **Kekurangan sumber daya yang berpotensi**
* **Ikatan dengan pemilik dalam rangka jangka waktu lama**

Salah satu aspek perbudakan modern yang memprihatinkan adalahdijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan: penempatan nilai moneter pada kehidupan seorang wanita, pria atau anak-anak. *Perdaganaganmanusia telah dijadikan bisinis yang sangat besar.* Hasil dari**CongressionalResearch service** bahwa**:” Trafficking telah berubah menjadi suatu sumber usaha besar; berdagang orang-ornag menghadirkan sumber keuntungan paling besar yang ketiga untuk kriminal terorganisasi setelah obat terlarang dan meriam, yang bisa menghasilkan pendapatan milyar dolar pertahun”.** Dihasilakan laporan yang sama dari **Congressional Reseach Service**, banyaknya aksi*human trafficking* yang terhindar dari aparat atau dari penegak hukum sehinggasangat sulit untuk mengkap gembong kejahatan lintas negara *(transnasional*), setiap pelaku ini mempunyai sindikat, yaitu sebagai berikut:

**Kelompok criminal terorganisasi yang beroprasi di dalam dan ke sebrang perbatasan sering terhindar dari hukum, jaringan ini adalah tersusun, terorganisir, dengan dengan baik dibiayai, dan dioprasikan di luar jangkauan pelaksanaan hukum. Beberapa traffickers adalah individu atau kelompok kecil orang-orang lalu lintas untuk tujuan yang sangat spesifik.**

Child Trafficking merupakan suatu tindakan pelanggaran Hak anak-anak. Ini karena setiap anak mempunyai hak seperti yang telah dirumuskan dalam konvensi hak anak-anak (*Convention on The Right of The Child*), dimana hak-hak tersebut terbagi kedalam empat kategori, yaitu:

1. **Hak terhadap kelangsungan hidup (survival Right)**
2. **Hak terhadap perlindungan (Protection Rights)**
3. **Hak untuk tumbuh dan berkembang (Development Rights)**
4. **Hak untuk berpartisipasi (Partipation Rights)[[33]](#footnote-33)**

Berdasarkan pada Universal Declaration on Human Right yang menyatakan bahwa hak anak sama dengan HAM, maka penting sekali menciptakan sebuah lingkungan keluarga yang bahagia harmonis bagi kehidupan anak-anak. Pernyataan dari *Declaration of The Child (tahun 1924 dan tahun 1959),* yaitu: **“anak masihdalam pertumbuhan fisik dan mental karena itu membutuhkan perlindungandan kepedulian khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupunsesudah lahir”**

**Protocol Perserikatan Bangsa-bangsa** *untuk mencegah, menekan danmenghukum perdagangan manusia, khususnya pada wanita dan anak-anak* (salahsatu dari tiga “**protocol palem”),** mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

**Perekrutan,pengiriman, pemindahan, penampungan,pemindahan, ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, member-menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan expolitasi. Expolitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari expolitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupaperbudakan**.

Dalam hal ini, PBB juga menjalankan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang-bidang promosi dan perlindungan terhadap HAM yang lebih sempit dan spesifik seperti salah satu contohnya: adalah hak-hak anak. Meskipun ada anggapan bahwa anak-anak telah cukup terlindungi oleh instrument-instrumen hak asasi yang ada, namun pada tahun 1979 (tahun anak-anak) di sepakati bahwa sebuah kelompok kerja komisi HAM harus menyusun sebuah konvensi yang akan mengefektifkan hak-hak tertenu yang berorintasi pada anak-anak.

Maka di butuhkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang penting untuk melindungi tumbuh kembang anak yang harmonis. Pemahaman atas kebutuhan khusus anak telah membawa masyarakat internasional pada keyakinan bahwa anak memiliki hak-haknya yang sama dengan manusia dewasa. Menurut Plano dan Olton:

**HAM merupakan perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebiasaan serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah atau individu atau kelompok. Jaminan hokum yang tercantum didalam konstitusi nasional dilengkapi****dengan perlindungan internasional yang diperoleh melalui tindakan organisasi internasional[[34]](#footnote-34)**

Dalam masalah *human trafficking* Indonesia breusaha mempertahankan prestise nasionalnya di mata dunia khususnya wilayah Asia tenggara, sekaligus mempertahankan ideologinya yang bertentangan dengan dengan masalah yang ada. Indonesia juga menjaga ketahanan dan keamanan nasional karena *human trafficking* melibatkan kelompok kriminal transnasional sebagai aktor non-negara.

Di era globalisasi ini, peranan aktor non negara memang semakin meningkat hingga muncul keterkaitan hubungan antra aktor non-negara dengan aktor negara. Hubungan antar aktor non-negara dengan aktor negara dalam pandangan pluralis menurut Viotty dan Kauppi adalah:

1. **Aktor non-negara merupakan bagian penting dalam hubungan internasional yang tidak bisa diabaikanNegara bukanlah satu-satunya aktor, karena terdapat pula aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, kelompok, individu.**
2. **Pluralisme menolak asumsi realis yang menyatakan negara sebagai satu-satunya aktor nasional Agenda dari politik internasional di perluas.**

Indonesia yang merupakan negara terbuka, tidak lepas dari pengaruh global dan regional. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dan ketahanan Indonesia yang terbentuk selama ini tidak berdiri sendiri namun di pengaruhi faktor eksternal. Isu domestik yang dihadapi Indonesia pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupaun tidak langsung, sehingga faktor yang saling berhubungan patut dicermati.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di asumsikan bahwa:

1. Pada saat ini Indonesia di hadapkan pada permasalahan *human trafficking* dan kejahatan antar negara atau transnasional, yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional.
2. Masalah perdagangan manusia di Indonesia merupakan agenda yang sangat besar untuk pemerintah Indonesia karena ini mreupkan masalah yang mengakibatkan kerugian negara mencapai milyaran rupiah setiap tahunnya.
3. Program yang dimiliki Indonesia untuk menghadapi tantangan pada pembangunan dalam meningkatkan keamanan dan ketahanan regional ASEAN untuk menanggulangi kejahatan transnasioanl *human trafficking*, *terorisme, drug trafficking* maupun *penyelundupan senjata* dan *money lundry* , agar kehidupan masyarakat dapat berjalan secara wajar.

**2. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis dan analisa yang telah di uraikan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

**“Bila Indonesia bisa mengurangi ancaman *Human Trafficking* yang muncul sebagai bentuk baru kejahatan transnasional maka ketahanan dan keamanan ASEAN tetap terjaga”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

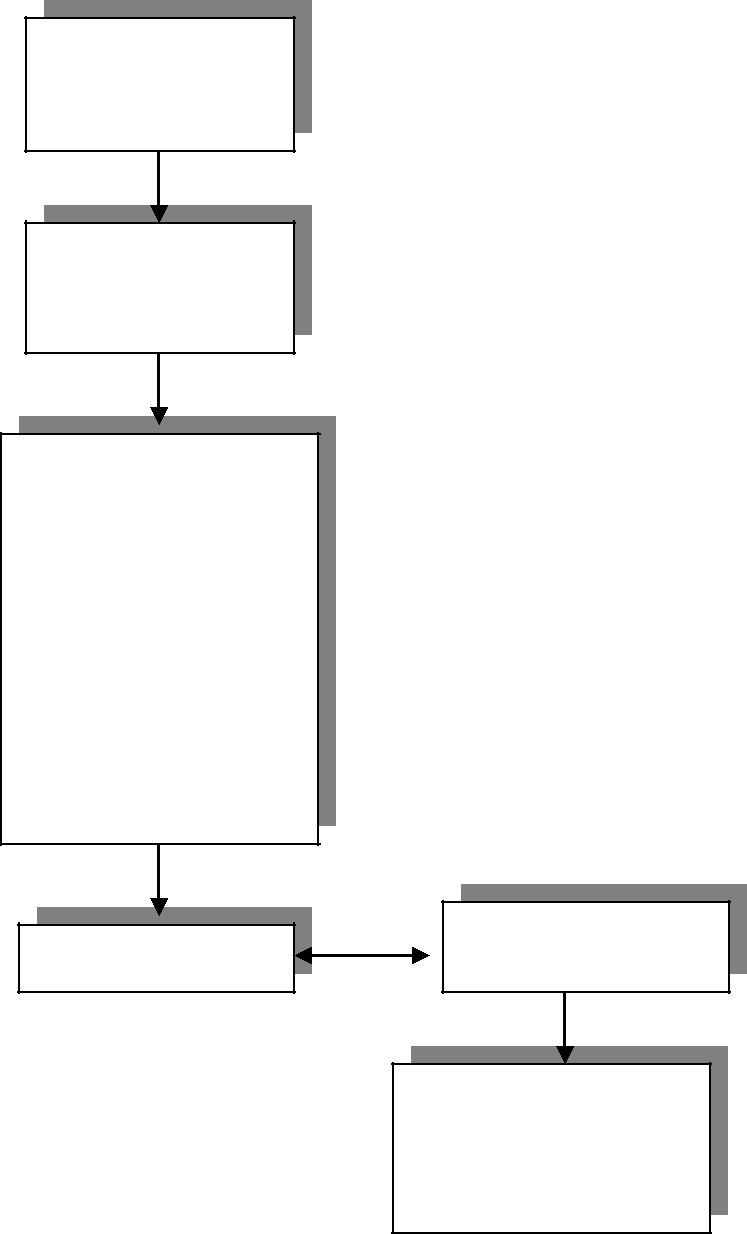
**Tabel. 1**

**Tabel Operasional dan indikator**



| **Variable dalam**  **Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| --- | --- | --- |
| Variabel Bebas:  Bila Indonesia dan ASEAN dapat meminimalisir ancaman Human Trafficking yang muncul sebagai bentuk baru kejahatan transnasional | 1. Adanya perhatian dari pemerintah terhadao ancaman *Human Trafficking* sebagai kejahatan transnasional | 1. Mengenali peran pemerintah dalam mengamil tindakan-tindakan efektf guna melawan pedagangan manusia, Kepres No. 87 Tahun 2002 tentang RAN Pengapusan Eksploitasi Perdagangan Anak dan Perempuan UU Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58) |
|  | 1. Upaya Pemberantasan Kejahatan | 1. Pada tanggal 15 November 2000 Indonesia menandatangani (*Signatory State*) terhadap *UN Convention Againts Transnational Organized Crime* yang di kenal dengan Konvensi Palermo |
| Variabel Terikat:  Menuntaskan masalah lintas batas yang menjadi ancaman bagi ketahanan dan keamanan ASEAN agar tetap tejaga | 1. Latar belakang menanggulangi kejahatan transnasional ASEAN | 1. Data (fakta) adanya latar belakang untuk menanggulangi kejahatan transnasional di ASEAN, diantaranya adalah *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* tahun 1999, adalah *Trafficking in percon dan piracy*. |
|  | 1. Peran pemerinta dalam mengurangi masalah *Human Trafficking*  baik perempuan maupun anak-anak khususnya di Indonesia; Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia. | 1. Adanya upaya yang dilakukan pemerinta dalam mencegah laju perkembangan kejahatan transnasional melalui koordinasi dengan ARF telah memperlihatkan fungsinya yang semakin penting sebagai wahana kerjasama di bidang politik dan mengelola masalah keamanan (*security management*) agar terjaga antara negara-negara ASEAN |

**4. Skema Kerangka Teoritis**



**Human**

**Traficking**

**Woman**

**Traficking**

**Kondisi**

**1. Geografis**

**2. Ekonomi,**

**dan**

**3. Sosial**

**Indonesia ASEAN**

**Stabilitastetap**

**terjaga**

**Pertahanan dan**

**Keamanan**

**E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Teknik pengumpulan data**

Tingkat analisa korelasionis, yaitu unit eksplanasi dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Hal ini di karenakan unit eksplanasi, yakni penataan yang sedang di lakukan oleh Indonesia, mempunyai pembahasan yang sama dengan unit analisanya, yaitu masalah yang dimiliki oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman *Human trafficking*

**2. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau langkah-langkah yang ditetapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah yang bertujuan mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang dihimpun. Untuk keperluan penelitian penulis melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan :

**a. Metode penelitian deskriptif**

Suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada. Metode deskriktif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian di ajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganlisa fenomena tersebut, serta untuk melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Metode ini digunakan untuk menjelaskan masalah yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia dalam menghadapi ancaman *humantrafficking* di Asia Tenggara.

**b. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumentasi dan kepustakaan (*library research)* maupun internet research untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi dan data serta materi yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan yang berfungsi sebgai tinjauan gunamendukung data-data primer yang di peroleh dari objek penelitian.

**F.** **Lokasi dan Lamanya Penelitian 1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa lembaga yang berhubungan erat dengan masalah yang di ajukan penulis. Adapun lembaga-lembga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Departemen Luar Negri Republik Indonesia, jl. Taman Pejambon No 4 (EXBP 7), Jakarta Pusat.
2. ASEAN *secretariat*, jl Singsingamaraja 70 A, Jakarta.
3. Departemen Pertahanan Republik Indonesia
4. Pusat Koordinasi Kejahatan Transnasional (*Transnational CrimeCoordination Centre/*TNCC), Markas Besar POLRI, Jl. TrunojoyoNo.3. Jakarta
5. *Center of Strategic Internasional Studies* (CSIS), Jl. Tanah Abang IIINo. 27, Jakarta.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta
7. Perpustakaan Universitas Parahyangan Jl. Cimbuleuit Bandung.
8. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.
9. **Lama penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan pada bulan Desember 2015 **s**ampai dengan bulan Mei 2016

1. *Human Right Document, Center for The Study Of Human Rights*. Hlm 6-9 [↑](#footnote-ref-1)
2. “*Trafficking in Person* “, dalam [www.Useinfo.state.gov/topical/global/Traffic/crs510](http://www.Useinfo.state.gov/topical/global/Traffic/crs510).htm, diakses 13 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. “*Perdagangan Manusia* “ dalam

   http:// stoptrafficking.or.id/index.php/option=comconten&task=blogecategory7id=0&itemid=53 diakses 13 Desembe 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Human Right Internasional Bill of Right* ( United Nation New York, 1995) hlm 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Perempuan (Dalam Achie Sudarti Luluhima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasaan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahnya*) (Jakarta Pusat Kajian Wanita Dan Gender. Universitas Indonesia,2000)hlm 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hesti R Wijaya, Penelitian Persfektif Gender ( dalam Jurnal Analisis Social, edisi 4)( Bandung: Akatiga 1996), hlm 23 [↑](#footnote-ref-6)
7. Bagong Suyanto, et.al. *Don”Tsell Perempuan Dan Anak Indonesia* (Jakarta Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan, jilid 29, 2003), hlm 64 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Sanuti Hariadi, Sinung D Kristanto, Bagong Suyanto . *Anak Rawan*, Bunga Ramapi Tentang Anak-Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Kerjasama pusat kajian anak Fisip Unair , Lembaga Penelitian anak Jawa Timur dan UNICEF) (Surabaya : Lutfansah,Mediatama, 2000) hlm 63 [↑](#footnote-ref-8)
9. D. Suganto, *Bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak dan Perempuan*[www.kompas.com/kompas/cetak/2510/80/nas05](http://www.kompas.com/kompas/cetak/2510/80/nas05). diakses 13 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bagong Suyanto, Op.cit., hlm 65-66 [↑](#footnote-ref-10)
11. D. Suganto, OP., Cit [↑](#footnote-ref-11)
12. *Eksploitasi PSK Anak Perempuan* dalamwww.unifeman.trafficking.org/why/articles/2001.html. Di akses 14 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-12)
13. D. Suganto.Loc.cit [↑](#footnote-ref-13)
14. Bagong Suyanto. Op.Cit, hlm.46 [↑](#footnote-ref-14)
15. Anak Agung Banyu Perwita, “*Tantangan Keamanan Baru ASEAN dan Gagasan ASC*” Kompas [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2003/09/10/brk,20030910-15,id.html>Di akses 14 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-16)
17. Konsep *unregulated migration* ini mengacu kepada perpindahan individu yang tidak terdokumentasikan, tidak sesuai prosedur dan ilegal, yang termasuk dalam permasalahan ini adalah *human smuggling* dan *human trafficking.* [↑](#footnote-ref-17)
18. http//www.ilo.org/archive/indonesia/ pr07\_19.htm di akses 15 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-18)
19. *80% Korban ”Trafficking” Asal Jabar*, Pikiran Rakyat, 10 Mei 2007 [↑](#footnote-ref-19)
20. Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, *Research Project on Illegal Migration and*  [↑](#footnote-ref-20)
21. Suwardi Wiraatmadja, pengantar *Hubungan internasional (*Surabaya : Tinta Mas, 1970),hlm27 [↑](#footnote-ref-21)
22. K.J. Holsti, *International Politic a Framework for Analisis* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya ,1986),hlm26 [↑](#footnote-ref-22)
23. Teuku May Rudy *Hubungan Internasional Konterporer dan Masalah-Masalah Global:isu konsep, Teori dan Paradigma(*Bandung: PT Refika Aditama, 2003)hlm.2. [↑](#footnote-ref-23)
24. Teuku May Rudy, *Oraganisasi dan Administrasi Internasional (*Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm.2. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dahlanin Nasution, Konsep Politik Internasional (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-25)
26. Mohtar Mas”oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi (Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia. 1994), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-26)
27. B.N Marbun, *Kamus Politik*. 1996. Hlm. 332 [↑](#footnote-ref-27)
28. Jack C Plano dan Roy Olton. Kamus Hubungan Internasional (terjemahan Wawan Djuanda)(Putra A BArdin, 1999), hlm.271 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid [↑](#footnote-ref-29)
30. Hans J. Morgentau, *Politik Antarbangsa* 1991,hlm 153 [↑](#footnote-ref-30)
31. Barry Buzan dikutip dalam Faustinus Andrea*. “ARF dan Rezim Keamanan Asia Pasifik”*, Koran Tempo,23 juni 2003 [↑](#footnote-ref-31)
32. Didi Kresna, Kamus Politik Internasional, 1993,hlm.245 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Convention The Rights of The Chid,* dalam http://The Human Right. Or.id di akses 20 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-33)
34. Jack. C. Plano and Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional,* (Bandung : CV. Abardin, 1990).hlm 268 [↑](#footnote-ref-34)